

75 Tahun 'Jogja Kembali'

SEJARAH Perang Kemerdekaan Indonesia menunjukkan bahwa Yogyakarta memiliki jiwa nasionalisme yang tangguh dan istimewa. Hal ini disebabkan karena Yogyakarta sarat dengan akar budaya yang kuat untuk menjaga dan mengembalikan semangat kebangsaan yang retak, terkoyak, bahkan terancam. Sewaktu ibukota RI masih berada di Jakarta, dan situasi keamanan semakin mengawat karena kedatangan tentara Sekutu, maka Pemerintah Pusat mempertimbangkan untuk hijrah ke luar kota Jakarta. Dengan tanpa ragu-ragu lagi, Sri Sultan HB IX mengulurkan tangan untuk mempersilakan Pemerintah Pusat hijrah ke Yogyakarta. Ini berarti Yogyakarta siap dan berani menanggung segala risiko yang terkait dengan keberadaan ibukota negara tersebut.

Atas dasar beberapa pertimbangan, terutama dalam bidang sekuriti, pada tanggal 4 Januari 1946, Presiden dan Wakil Presiden RI hijrah ke Yogyakarta. Sejak itu dimulailah periode RI Yogyakarta. Dalam periode ini, serangan-serangan Belanda dipusatkan untuk menghancurkan Yogyakarta. Peranan yang dimainkan maupun suara yang dikumandangkan oleh Yogyakarta, mulai diperhatikan dan diperhitungkan oleh dunia.

Mengingat peran yang dimainkan oleh RI Yogyakarta itu, maka pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda menyerbunya. Dengan berbagai pertimbangan, TNI tidak melakukan perlawanan besar-besaran sehingga Belanda berhasil mencapai istana presiden. Sebelum ditawan Belanda, Presiden Soekarno memberikan semangat juang kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa kemerdekaan yang telah kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan telah meresap pada jiwa kita, mustahil dapat ditindas dengan kekerasan.

Reaksi dunia atas penyerangan Belanda terhadap RI Yogyakarta luar biasa. Dunia umumnya marah, terutama karena Belanda berani melanggar suatu persetujuan gencatan senjata yang disponsori PBB, apalagi serangan itu dilakukan di depan

A Kardiyat Wiharyanto

hidung KTN. Sehari sesudah Belanda menyerang Yogyakarta, Wakil Amerika di PBB minta supaya Dewan Keamanan mengadakan sidang darurat dan kemudian berhasil mengeluarkan resolusi agar segera diadakan gencatan senjata dan penarikan mundur pasukan mereka.

Belanda tidak mau menjalankan resolusi tersebut. KTN melaporkan bahwa



Setelah mendengar sikap Belanda itu, maka Sri Sultan segera memerintahkan untuk mengadakan rapat rahasia. Sri Sultan berunding dengan Komandan SW III, Letkol Soeharto (Presiden RI ke-2) di Kraton Yogyakarta. Rapat memutuskan untuk melakukan serangan umum terhadap kota Yogyakarta yang diduduki Belanda pada tanggal 1 Maret 1949.

Serangan umum itu bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Pemerintah RI beserta TNI masih ada, tidak punah, tidak terhapus seperti apa yang dikatakan Belanda. Di samping itu, serangan umum juga merupakan suatu reaksi terhadap sikap Belanda yang meremehkan resolusi Dewan Keamanan PBB.

Dengan demikian jelaslah bahwa selama periode Republik Jogja, perjuangan mempertahankan kemerdekaan berlangsung dengan gencar dan efektif, baik dalam bentuk gerilya maupun perundingan, sehingga RI bisa dipertahankan dan diselamatkan. Dan para pemimpin RI kembali ke ibukota RI, Yogyakarta.

Pada tanggal 29 Juni 2024 ini, peristiwa Jogja Kembali genap berusia 75 tahun. Dengan meresapkan peristiwa Jogja Kembali itu, kita mengembalikan semangat nasionalisme dan heroisme. Bukan rahasia lagi bahwa nasionalisme Indonesia tidak hanya tumbuh tetapi juga berkembang terus di Yogyakarta. Bagaimanapun juga Yogyakarta memang istimewa. □-d

**) Drs A Kardiyat Wiharyanto,
M.M, Dosen Universitas Sanata
Dharma Yogyakarta.*

wa Belanda terus menjalankan penyerbuan ke wilayah RI. Karena itu Dewan Keamanan bertindak lagi terutama setelah adanya Konferensi Inter Asia tentang Indonesia yang disponsori Nehru. Dengan dijiwai oleh keputusan konferensi tersebut, maka pada tanggal 28 Januari 1949 DK PBB mengeluarkan resolusi agar Belanda dan RI mengadakan gencatan senjata, mengembalikan pemimpin-pemimpin RI dan perundingan.

Belanda menolak untuk mengembalikan RI di bawah Presiden Soekarno ke residensi Yogyakarta. Adapun alasan Belanda karena RI sudah tidak ada, sudah dihapus. Ternyata berita tentang penolakan Belanda itu sempat didengar oleh Sri Sultan HB IX. Konon, beliau mendengar dari berita yang disiarkan radio Australia.